



ບົນນິທູງ ກຸກອາ ກຸກອາມີ
 PEMERINTAH KOTA DENPASAR

ຂໍ້ສະເໜີສາທາລະນະ
DINAS KESEHATAN

ຄະນະລັດຖະທຳມະນູນຂອງສະຫະລັດອິນໂດເນເຊຍ (ອັງກິດ) ແຫ່ງເມັດຮາຊີເກີດາ (ອັງກິດ) ສະຫະລັດອິນໂດເນເຊຍ
 Jl. Maruti No. 8 Denpasar, Telepon (0361) 424801 Fax (0361) 425369
 Laman : www.denpasarkota.go.id, Pos-el : kesehatan@denpasarkota.go.id

Denpasar, 11 April 2025

Yth. Sekretaris Daerah Kota Denpasar

c.q. Kepala Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah

di-

Denpasar

SURAT PENGANTAR

Nomor : 000.7/956/Dikes

No.	Uraian	Banyaknya	Keterangan
1.	Penyampaian Laporan Manajemen Resiko Triwulan I Tahun 2025 Dinas Kesehatan Kota Denpasar	1 (satu) berkas	Bersama ini dikirim dengan hormat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Diterima tanggal

Penerima

Nama Jabatan,

Nama :

Pangkat/Golongan :

NIP :

Nomor telepon :



Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar



dr. Anak Agung Ayu Agung Candrawati, M.Kes.

Pembina Tk. I

NIP. 196709151998032003

 	<p>Semua jenis layanan di Dinas Kesehatan Kota Denpasar tidak dikenakan biaya. Untuk menjaga integritas seluruh jajaran Dinas Kesehatan Kota Denpasar tidak menerima pemberian sesuatu dalam bentuk apapun. Bagi penerima layanan dilarang member sesuatu dalam bentuk apapun, jika ada yang meminta sesuatu dengan mengatasnamakan Dinas Kesehatan Kota Denpasar, dipastikan merupakan penipuan dan dapat dilaporkan melalui email kesehatan@denpasarkota.go.id dengan disertai bukti otentik.</p>
--	---

DINAS KESEHATAN KOTA DENPASAR



LAPORAN MANAJEMEN RESIKO

TRIWULAN I

TAHUN 2025

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN	1
KATA PENGANTAR	1
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	
B. Dasar Hukum	
C. Maksud Dan Tujuan	
D. Ruang Lingkup	
BAB II RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RESIKO PEMERINTAH DAERAH	
A. Rencana Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Triwulan I Tahun 2025	
B. Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Triwulan I Tahun 2025	
BAB III HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN	
BAB IV MONITORING RISIKO DAN RTP	
BAB V PENUTUP	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Hasil Analisis Risiko .
- Lampiran 2. Daftar Risiko Prioritas
- Lampiran 3. Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan .
- Lampiran 4. Daftar Rencana Tindak Pengendalian.
- Lampiran 5. Pemantauan Kegiatan Pengendalian
- Lampiran 6. Pencatatan Kejadian Risiko (Risk Event) Dan Pelaksanaan RTP

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan rahmat Nya Laporan Pengelolaan Risiko Dinas kesehatan Kota Denpasar Triwulan I Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu.

Manajemen risiko berkelanjutan yang digunakan untuk melakukan identifikasi dan mengurangi dampak serta mengurangi risiko lain terhadap penyelenggaraan upaya-upaya kesehatan yang ada diselenggarakan di Dinas Kesehatan Kota Denpasar. Kegiatan manajemen resiko di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Denpasar dilakukan terhadap kejadian resiko dan kegiatan pengendalian yang telah dilaksanakan.

Kami ucapkan terimakasih atas dukungan dan kerjasama semua pihak dalam penyusunan laporan pengelolaan resiko ini serta terhadap pelaksanaan dan pengelolaan manajemen risiko di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Denpasar. Semoga pelaksanaan manajemen risiko ini dapat memberikan manfaat yang sebesar - besarnya bagi Dinas Kesehatan Kota Denpasar dan bagi masyarakat.



ບົນນິທຸງ ກຸກອາ ກຸກຄາມ
PEMERINTAH KOTA DENPASAR

ຂົນສົ່ງ ສົມບູນສາສາ
DINAS KESEHATAN

ຄະນະກຳມະການກວດກາງານສາທາລະນະ (ອຸດສາຫະກຳ) ແຫ່ງເມັດສະໂນລາຍສະໂນລາຍ (ອຸດສາຫະກຳ) ແຫ່ງອຸດສາຫະກຳ
Jl. Maruti No. 8 Denpasar, Telepon (0361) 424801 Fax (0361) 425369
Laman : www.denpasarkota.go.id, Pos-el : kesehatan@denpasarkota.go.id

LAPORAN TW I PENGELOLAAN RESIKO PEMERINTAH DAERAH KOTA DENPASAR

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), merupakan salah satu langkah yang ditetapkan pemerintah dalam merumuskan metode guna memperbaiki sistem pengendalian internal agar pelaksanaan kegiatan pemerintah dapat dijalankan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel melalui budaya pengendalian internal (*internal control culture*). Menteri PAN dan RB melalui Surat Edaran nomor 12 Tahun 2010 tentang Penerapan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Instansi Pemerintah, menegaskan perlunya langkah-langkah guna mendorong pelaksanaan reformasi birokrasi dan tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pengelolaan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sejalan dengan hal tersebut, tata kelola pemerintahan yang tertib, efektif, efisien, akuntabel dan transparan khususnya di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Denpasar akan terwujud apabila seluruh jajaran pimpinan dan pegawai memiliki komitmen yang kuat dalam menyelenggarakan kegiatan pengendalian atas keseluruhan kegiatan pemerintah dimasing-masing bidang atau unit kerjanya. Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dimulai dari

perencanaan, pelaksanaan, pelaporan sampai dengan pertanggungjawaban harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, efektif dan efisien. Hal tersebut sejalan dengan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah, dimana ditekankan perlunya suatu upaya untuk meningkatkan penerapan pengendalian internal pemerintah secara sistematis, masif dan terstruktur untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

B. Dasar Hukum

Laporan ini disusun berdasarkan pada:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)
2. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara
3. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kota Denpasar;
4. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah
5. Keputusan Walikota Denpasar Nomor 188.45/874/HK/2018 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kota Denpasar;
6. Keputusan Walikota Denpasar Nomor 188.45/1566/HK/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
7. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar Nomor 830/3498/Dikes tentang Pembentukan Struktur Pengelolaan Resiko Pada Dinas Kesehatan Kota Denpasar Tahun 2021-2026.

C. Maksud dan Tujuan

Laporan pengelolaan Resiko ini disusun dengan:

1. Maksud untuk dapat mengelola segala risiko yang timbul dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Kesehatan Kota Denpasar.
2. Tujuan dilakukan pengelolaan risiko
 - a. Mewujudkan budaya pengendalian intern dalam penyelenggaraan pemerintahan di Dinas Kesehatan Kota Denpasar

- b. Memberikan informasi pelaksanaan penyelenggaraan Pengelolaan Risiko di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Denpasar
- c. Mengidentifikasi hambatan dan kendala-kendala didalam penyelenggaraan kegiatan di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Denpasar
- d. Memberikan gambaran rencana pemecahan masalah
- e. Memberikan informasi hasil tindak lanjut pemecahan masalah

D. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup kegiatan manajemen resiko di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Denpasar dilakukan terhadap kejadian resiko dan kegiatan pengendalian yang dilaksanakan sampai dengan triwulan I tahun 2025 yang meliputi identifikasi resiko, analisis resiko, evaluasi resiko, realisasi atas kegiatan pengendalian resiko, hambatan pelaksanaan kegiatan, serta monitoring resiko dan RTP.

BAB II
RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RESIKO
PEMERINTAH DAERAH

A. Rencana Kegiatan Pengelolaan Resiko Pemerintah Daerah Triwulan I

1. Identifikasi Resiko

jumlah resiko yang telah teridentifikasi sebanyak 71 (dari populasi resiko) dengan rincian sebagaimana terdapat pada lampiran 1.

2. Analisis Resiko Dan Evaluasi Resiko

Dari 71 resiko yang teridentifikasi (seluruhnya merupakan bagian dari usulan resiko yang disampaikan kepada unit manajemen resiko) telah dianalisis dengan hasil sebagai berikut:

- a. Jumlah resiko yang berada diatas selera resiko sebanyak 0 resiko (0 dari resiko) yang merupakan resiko prioritas unit kerja dapat dilihat pada lampiran 2
- b. Seluruh prioritas telah memiliki existing control (sebanyak 0 resiko atau 0 % dari jumlah/populais resiko prioritas)
- c. Sebanyak 0 resiko prioritas telah memiliki existing control namun belum memadai sebanyak 0 resiko atau 0 % dari jumlah/populais resiko prioritas. Daftar analisis resiko dapat dilihat pada lampiran 3

B. Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Triwulan I

Penyelenggaraan SPIP pada Dinas Kesehatan Kota Denpasar dilaksanakan melalui pengendalian oleh Unit Pemilik Resiko dengan pendekatan Manajemen Risiko (MR). Realisasi kegiatan pengelolaan risiko pada Dinas Kesehatan Kota Denpasar triwulan I tahun 2025 didapatkan hasil sebagai berikut:

1. Jumlah kegiatan pengendalian yang direncanakan pada triwulan I sebanyak 0 kegiatan pengendalian. Daftar rencana tindak pengendalian dapat dilihat pada lampiran 4.

2. Jumlah kegiatan pengendalian yang telah terealisasi pada triwulan I sebanyak 0 Atau 0 % kegiatan pengendalian. Daftar pemantauan kegiatan pengendalian dapat dilihat pada lampiran 5.
3. Tidak terdapat kegiatan pengendalian yang dilaksanakan sebelum rencana yang seharusnya dilaksanakan pada triwulan berikutnya.

BAB III

HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Manajemen Risiko fokus kepada tindak pengendalian atas program dan kegiatan yang dilaksanakan. Dalam pelaksanaan kegiatan pada Dinas Kesehatan Kota Denpasar ada beberapa kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian yang telah disusun sehingga terjadi gap antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan resiko pemerintah daerah. Adapun beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi sebagai berikut :

1. Mobilitas Penduduk yang cukup tinggi di Kota Denpasar ditambah lagi belum optimalnya sistem pencatatan penduduk pendatang sehingga masih kesulitan membedakan penduduk permanen dan non permanen dalam pencatatan dan pelaporan serta dalam upaya tindak lanjut program/kegiatan penurunan angka kematain Ibu, kematian bayi dan balita.
2. Peran Serta Masyarakat dan Lintas sektor dalam upaya-upaya pencapaian program/kegiatan di bidang kesehatan masih menjadi kendala seperti pendataan sasaran, pelaporan kejadian-kejadian bidang kesehatan (kejadian kesakitan baik penyakit menular dan tidak menular maupun kejadian kematian dan kejadian lainnya terkait pemantauan / epidemiologi penyakit lainnya di masyarakat).
3. Sarana Dan Prasarana serta kapasitas tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan baik milik pemerintah maupun klinik/rumah sakit rujukan (terutama non pemerintah) masih perlu mendapat perhatian jika melihat dari hasil audit kejadian kematian ibu, bayi dan balita masih ditemukan di RS karena faktor keterbatasan sarana prasarana dan kompetensi petugas.

BAB IV

MONITORING RESIKO DAN RTP

Tidak terdapat kejadian risiko yang muncul di triwulan I pada Dinas Kesehatan Kota Denpasar. Daftar pemantauan keterjadian risiko dapat dilihat pada tabel Lampiran 6.

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan Bahwa Dinas Kesehatan Kota Denpasar telah melaksanakan analisis manajemen resiko pada setiap program/kegiatan yang ada di lingkungan dinas kesehatan pada triwulan I tahun 2024. Pada Dinas Kesehatan Kota Denpasar terdapat 71 risiko yang teridentifikasi dan 0 (tidak ada) diantaranya merupakan risiko prioritas.

Analisis manajemen resiko harus dilakukan agar dapat mengetahui seberapa besar resiko dari setiap program/kegiatan yang dilaksanakan. Sehingga dari resiko yang muncul dapat diminimalisir dan jika memungkinkan dihilangkan. Dan diharapkan setiap program/kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Kesehatan Kota Denpasar dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Adapun strategi yang dilaksanakan adalah dalam upaya untuk meminimalisir resiko adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi lintas program dan lintas sektor terkait pelaksanaan program/ kegiatan bidang kesehatan.
2. Meningkatkan upaya pemberdayaan masyarakat dan peran aktif masyarakat didalam upaya untuk kemandirian bidang kesehatan dan meningkatkan cakupan program terutama yang menjadi program prioritas baik pemerintah kota, provinsi maupun nasional.
3. Mendorong upaya meningkatkan kompetensi petugas kesehatan tidak hanya melalui workshop/pelatihan yang bersumber dari dana pemerintah kota namun dapat melalui kegiatan peningkatan kompetensi seperti onjob training, kegiatan peningkatan kompetensi yang dilaksanakn secara daring oleh organisasi profesi, Dinas Kesehatan Kota/Provinsi dan Kementerian Kesehatan maupun secara mandiri (seminar/orientasi/bimtek/workshop/pelatihan).

Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar



dr. Anak Agung Ayu Agung Candrawati, M.Kes.

Pembina Tk. I

NIP. 196709151998032003

Semua jenis layanan di Dinas Kesehatan Kota Denpasar tidak dikenakan biaya. Untuk menjaga integritas seluruh jajaran Dinas Kesehatan Kota Denpasar tidak menerima pemberian sesuatu dalam bentuk apapun. Bagi penerima layanan dilarang memberi sesuatu dalam bentuk apapun, jika ada yang meminta sesuatu dengan mengatasnamakan Dinas Kesehatan Kota Denpasar dipastikan merupakan penipuan dan dapat dilaporkan melalui email kesehatan@denpasarkota.go.id dengan disertai bukti otentik.

Lampiran I. Hasil Analisis Risiko

FORM 4
Hasil Analisis Risiko

Nama Pemda	: Pemerintah Kota Denpasar				
Tahun Penilaian	: 2025				
Tujuan Strategis	: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat				
Urusan Pemerintahan	: Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan				
Analisis Risiko					
No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Skala Resiko
a	b	c	d	e	f=dxe
I Risiko Strategis Pemda					
1	tidak tercapainya target angka harapan hidup (AHH) Kota Denpasar	RSP.25.02.06.01	3	2	6
II Risiko Strategis OPD					
1	tidak tercapainya indikator-indikator kinerja program yaitu masih terjadinya KLB, meningkatnya angka kematian bayi per 1000 Kelahiran Hidup, meningkatnya Angka kematian ibu per 100.000 Kelahiran Hidup, Turunya Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan serta meningkatnya Persentase Balita stunting	RSO.25.02.06.02	4	2	8
2	Administrasi kesekretariatan tidak terselesaikan tepat waktu	RSO.25.02.06.01	3	2	6
3	adanya tenaga kesehatan yang praktek tidak memiliki ijin	RSO.25.02.06.03	3	2	6
4	adanya tempat pengelolaan makanan (TPM) yang tidak memenuhi syarat	RSO.25.02.06.04	3	2	6
5	adanya Rumah Tangga yang tidak melaksanakan PHBS (Perilaku Hidup Bersih Sehat)	RSO.25.02.06.05	3	2	6
III Risiko Operasional OPD					
1	tidak optimalnya pelayanan kesehatan sesuai siklus hidup (ibu hamil, ibu melahirkan, bayi, balita, usia pendidikan dasar, remaja, usia produktif dan lansia), tidak optimalnya tata kelola dan pelayanan penyakit menular dan tidak menular, tidak optimalnya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat dan tidak optimalnya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan kepada masyarakat	ROO.25.02.06.07	4	2	8
2	masih adanya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang tidak Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan sesuai standar, adanya Pengadaan dan distribusi Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang tidak sesuai ketentuan	ROO.25.02.06.06	3	2	6
3	rendahnya persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	ROO.25.02.06.12	3	2	6
4	adanya Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan & Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) memiliki ijin	ROO.25.02.06.13	3	2	6

5	adanya Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan yang tidak dilakukan pengawasana serta tidak memiliki Stiker Pembinaan	ROO.25.02.06.16	3	2	6
6	adanya Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) yang tidak diawasi dan tidak memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi	ROO.25.02.06.15	3	2	6
7	tidak Terlaksananya pemeriksaan laboratorium pewarna dan pengawet yang dilarang pada makanan/minuman	ROO.25.02.06.17	3	2	6
8	tidak optimalnya kegiatan Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	ROO.25.02.06.18	3	2	6
9	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN tidak sesuai dengan kebutuhan	ROO.25.06.02.01	2	2	4
10	Adanya standar harga barang dan jasa yang tidak terakomodir dalam perwali	ROO.25.02.06.04	2	2	4
11	tidak tepatnya penyusunan RBA BLUD dan waktu realisasi pengadaan barang/jasa untuk peningkatan pelayanan BLUD	ROO.25.02.06.05	2	2	4
12	Sistem Informasi Kesehatan tidak dikelola dengan optimal	ROO.25.02.06.08	2	2	4
13	Faskes tidak memenuhi standar mutu	ROO.25.02.06.09	4	1	4
14	adanya Industri Pangan Rumah Tangga yang tidak bersertifikat Produksi	ROO.25.02.06.14	2	2	4
15	adanya tenaga kesehatan yang praktek tidak memiliki ijin	ROO.25.02.06.10	3	1	3
16	tidak optimalnya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	ROO.25.02.06.19	3	1	3
17	Tidak tepat waktunya realisasi pengadaan barang/jasa untuk operasional kantor	ROO.25.02.06.02	2	1	2
18	Tidak tepatnya waktu realisasi pengadaan barang/jasa untuk penunjang operasional kantor	ROO.25.02.06.03	2	1	2
19	tidak terlaksananya perencanaan kebutuhan SDM	ROO.25.02.06.11	2	1	2
IV	Risiko Fraud OPD				
1	Penyusunan RBA yang tidak sesuai dengan kebutuhan riil	RF.25.02.06.10	3	3	9
2	Penyusunan anggaran kebutuhan kantor dan Rencana Kebutuhan BMD yang tidak sesuai dengan kebutuhan riil	RF.25.02.06.03	2	3	6
3	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak valid	RF.25.02.06.07	3	2	6
4	Penyusunan kebutuhan pemeliharaan BMD yang tidak sesuai dengan kebutuhan riil	RF.25.02.06.08	3	2	6
5	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak valid	RF.25.02.06.09	3	2	6
6	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak valid	RF.25.02.06.11	3	2	6
7	Penyusunan rencana penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kabupaten/kota tidak sesuai dengan kebutuhan riil	RF.25.02.06.12	3	2	6
8	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak valid	RF.25.02.06.13	3	2	6
9	Penyusunan rencana Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota tidak sesuai dengan kebutuhan riil	RF.25.02.06.14	3	2	6

10	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak valid	RF.25.02.06.19	3	2	6
11	Penyusunan kebutuhan BMD yang tidak sesuai dengan kebutuhan riil	RF.25.02.06.06	2	2	4
12	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak valid	RF.25.02.06.15	2	2	4
13	Penyusunan rencana Sistem Informasi Kesehatan untuk pelayanan tidak sesuai dengan kebutuhan riil	RF.25.02.06.16	2	2	4
14	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak valid	RF.25.02.06.17	2	2	4
15	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak valid	RF.25.02.06.22	2	2	4
16	Penyusunan rencana kegiatan Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan tidak sesuai kondisi riil	RF.25.02.06.18	3	1	3
17	Penyusunan rencana kegiatan Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota tidak sesuai kondisi riil	RF.25.02.06.21	3	1	3
18	Benturan kepentingan dalam proses Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	RF.25.02.06.23	3	1	3
19	Penyusunan rencana kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kotatidak sesuai kondisi riil	RF.25.02.06.26	3	1	3
20	Penyusunan rencana kegiatan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) tidak sesuai kondisi riil	RF.25.02.06.28	3	1	3
21	Benturan kepentingan dalam proses Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	RF.25.02.06.30	3	1	3
22	Penyusunan rencana kegiatan Penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan Nomor P-IRT sebagai izin produksi, makanan dan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri rumah tangga tidak sesuai kondisi riil	RF.25.02.06.31	3	1	3
23	Benturan kepentingan dalam proses Penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan Nomor P-IRT sebagai izin produksi, makanan dan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri rumah tangga	RF.25.02.06.33	3	1	3
24	Penyusunan rencana kegiatan Penerbitan sertifikat laik sehat higiene sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan depot air minum (DAM) tidak sesuai kondisi riil	RF.25.02.06.34	3	1	3
25	Benturan kepentingan dalam proses Penerbitan sertifikat laik sehat higiene sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan depot air minum (DAM)	RF.25.02.06.36	3	1	3
26	Penyusunan rencana kegiatan Penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan tidak sesuai kondisi riil	RF.25.02.06.37	3	1	3
27	Benturan kepentingan dalam proses Penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan	RF.25.02.06.39	3	1	3

28	Penyusunan rencana kegiatan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga tidak sesuai kondisi riil	RF.25.02.06.40	3	1	3
29	Benturan kepentingan dalam proses Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	RF.25.02.06.42	3	1	3
30	Penyusunan rencana kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota tidak sesuai kondisi riil	RF.25.02.06.43	3	1	3
31	Penyusunan rencana kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat tidak sesuai kondisi riil	RF.25.02.06.45	3	1	3
32	Persekongkolan pembayaran gaji pegawai negeri yang akan pensiun	RF.25.02.06.01	2	1	2
33	Laporan Pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.25.02.06.02	2	1	2
34	Benturan kepentingan dalam proses penetapan penyedia barang dan jasa	RF.25.02.06.04	2	1	2
35	Pejabat berwenang memberikan bukti-bukti yang sudah di rekayasa sebagai bentuk pertanggungjawaban	RF.25.02.06.05	2	1	2
36	Benturan kepentingan dalam proses Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan pada Fasilitas Kesehatan	RF.25.02.06.20	2	1	2
37	Penyusunan rencana kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah Kabupaten/Kota tidak sesuai kondisi riil	RF.25.02.06.24	2	1	2
38	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak valid	RF.25.02.06.25	2	1	2
39	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak valid	RF.25.02.06.27	2	1	2
40	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak valid	RF.25.02.06.29	2	1	2
41	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak valid	RF.25.02.06.32	2	1	2
42	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak valid	RF.25.02.06.35	2	1	2
43	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak valid	RF.25.02.06.38	2	1	2
44	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak valid	RF.25.02.06.41	2	1	2
45	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak valid	RF.25.02.06.44	2	1	2
46	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak valid	RF.25.02.06.46	2	1	2

Lampiran 2. Daftar Risiko Prioritas

Form 5						
Daftar Risiko Prioritas PEMDA						
Nama Pemda	: Pemerintah Kota Denpasar					
Tahun Penilaian	: 2025					
Tujuan Strategis	: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat					
Urusan Pemerintahan	: Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan					
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
I	Risiko Strategis					
1	tidak tercapainya target angka harapan hidup (AHH) Kota Denpasar	RSP.25.02.06.01	'-	'-	'-	'-

Lampiran 3 Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan

Form 7							
Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan PEMDA							
(RTP atas Hasil Identifikasi Risiko) PEMDA							
Nama Pemda	: Pemerintah Kota Denpasar						
Tahun Penilaian	: 2023						
Tujuan Strategis	: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat						
Urusan Pemerintahan	: Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan						
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
I	Risiko Strategis						
1	tidak tercapainya target angka harapan hidup (AHH) Kota Denpasar	RSP.25.02.06.01	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
2							

Lampiran 4. Daftar Rencana Tindak Pengendalian

Form 8							
RENCANA DAN REALISASI ATAS PENGKOMUNIKASIAN ATAS PENGENDALIAN YANG DI BANGUN PEMDA							
Nama Pemda		: Pemerintah Kota Denpasar					
Tahun Penilaian		: 2025					
Tujuan Strategis		: Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat					
Urusan Pemerintahan		: Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan					
No	Kegiatan Pengendalian yang dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
1	-	-	-	-	-	-	-
2							

Lampiran 5. Pemantauan Kegiatan Pengendalian

Form 9						
RENCANA DAN REALISASI PEMANTAUAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN INTERN YANG DIBUTUHKAN PEMDA						
Nama Penda	: Pemerintah Kota Denpasar					
Tahun Penilaian	: 2025					
Tujuan Strategis	: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat					
Urusan Pemerintahan	: Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan					
No	Kegiatan Pengendalian Yang dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan Yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
1	-	-	-	-	-	-
2						

Lampiran 6. Pencatatan Kejadian Resiko (Risk Event) Dan Pelaksanaan RPT

PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVEN) DAN PELAKSANAAN RTP										
Nama Pemda		: Pemerintah Kota Denpasar								
Tahun Penilaian		: 2025								
Tujuan Strategis		: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat								
Urusan Pemerintahan		: Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan								
No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Ket	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Ket
			Tanggal terjadi	Sebab	Dampak					
I Risiko Strategis Pemda										
1	tidak tercapainya target angka harapan hidup (AHH) Kota Denpasar	RSP.25.02.06.01	NIHL	NIHL	NIHL	NIHL	NIHL	NIHL	NIHL	NIHL
2	tidak tercapainya indikator-indikator kinerja program yaitu masih terjadinya KLB, meningkatnya angka kematian bayi per 1000 Kelahiran Hidup, meningkatnya Angka kematian ibu per 100.000 Kelahiran Hidup, Turunya Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan serta meningkatnya Persentase Balita stunting	RSO.25.02.06.01	NIHL	NIHL	NIHL	NIHL	NIHL	NIHL	NIHL	NIHL
3	adanya tenaga kesehatan yang praktek tidak memiliki ijin	RSO.25.02.06.02	NIHL	NIHL	NIHL	NIHL	NIHL	NIHL	NIHL	NIHL
4	adanya tempat pengelolaan makanan (TPM) yang tidak memenuhi syarat	RSO.25.02.06.03	NIHL	NIHL	NIHL	NIHL	NIHL	NIHL	NIHL	NIHL
5	adanya Rumah Tangga yang tidak melaksanakan PHBS (Perilaku Hidup Bersih Sehat)	RSO.25.02.06.04	NIHL	NIHL	NIHL	NIHL	NIHL	NIHL	NIHL	NIHL
6	Administrasi kesekretariatan tidak terselesaikan tepat waktu	ROO.25.06.02.01	NIHL	NIHL	NIHL	NIHL	NIHL	NIHL	NIHL	NIHL
7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN tidak sesuai dengan kebutuhan	ROO.25.06.02.02	NIHL	NIHL	NIHL	NIHL	NIHL	NIHL	NIHL	NIHL
8	Persekongkolan pembayaran gaji pegawai negeri yang akan pensiun	RF.25.02.06.01	NIHL	NIHL	NIHL	NIHL	NIHL	NIHL	NIHL	NIHL
9	Laporan Pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.25.02.06.02	NIHL	NIHL	NIHL	NIHL	NIHL	NIHL	NIHL	NIHL

10	Tidak tepat waktunya realisasi pengadaan barang/jasa untuk operasional kantor	ROO.25.02.06.03	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
11	Penyusunan anggaran kebutuhan kantor dan Rencana Kebutuhan BMD yang tidak sesuai dengan kebutuhan riil	RF.25.02.06.03	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
12	Benturan kepentingan dalam proses penetapan penyedia barang dan jasa	RF.25.02.06.04	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
13	Terjadinya pemecahan kegiatan PBJ karena adanya benturan kepentingan sehingga rawan terjadi penyuaian atau justru berpotensi pada kerugian keuangan negara	RF.25.02.06.05	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
14	Calon Penyedia pada etalase katalog lokal kurang dari 3 (tiga) sehingga kurang mendukung pelaksanaan persaingan yang sehat dan berpotensi timbulnya fee proyek	RF.25.02.06.06	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
15	Pejabat berwenang memberikan bukti-bukti yang sudah di rekayasa sebagai bentuk pertanggungjawaban	RF.25.02.06.07	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
16	Tidak tepatnya waktu realisasi pengadaan barang/jasa untuk menunjang operasional kantor	ROO.25.02.06.04	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
17	Penyusunan kebutuhan BMD yang tidak sesuai dengan kebutuhan riil	RF.25.02.06.08	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
18	Terjadinya pemecahan kegiatan PBJ karena adanya benturan kepentingan sehingga rawan terjadi penyuaian atau justru berpotensi pada kerugian keuangan negara	RF.25.02.06.09	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
19	Calon Penyedia pada etalase katalog lokal kurang dari 3 (tiga) sehingga kurang mendukung pelaksanaan persaingan yang sehat dan berpotensi timbulnya fee proyek	RF.25.02.06.10	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
20	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak valid	RF.25.02.06.11	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
21	Adanya standar harga barang dan jasa yang tidak terakomodir dalam perwali	ROO.25.02.06.05	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
22	Penyusunan kebutuhan pemeliharaan BMD yang tidak sesuai dengan kebutuhan riil	RF.25.02.06.12	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
23	Terjadinya pemecahan kegiatan PBJ karena adanya benturan kepentingan sehingga rawan terjadi penyuaian atau justru berpotensi pada kerugian keuangan negara	RF.25.02.06.13	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
24	Calon Penyedia pada etalase katalog lokal kurang dari 3 (tiga) sehingga kurang mendukung pelaksanaan persaingan yang sehat dan berpotensi timbulnya fee proyek	RF.25.02.06.14	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

25	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak valid	RF.25.02.06.15	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
26	tidak tepatnya penyusunan RBA BLUD dan waktu realisasi pengadaan barang/jasa untuk peningkatan pelayanan BLUD	ROO.25.02.06.06	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
27	Penyusunan RBA yang tidak sesuai dengan kebutuhan riil	RF.25.02.06.16	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
28	Terjadinya pemecahan kegiatan PBJ karena adanya benturan kepentingan sehingga rawan terjadi penyuaian atau justru berpotensi pada kerugian keuangan negara	RF.25.02.06.17	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
29	Calon Penyedia pada etalase katalog lokal kurang dari 3 (tiga) sehingga kurang mendukung pelaksanaan persaingan yang sehat dan berpotensi timbulnya fee proyek	RF.25.02.06.18	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
30	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak valid	RF.25.02.06.19	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
31	tidak optimalnya Proses Pemberian Layanan kepada Masyarakat	RF.25.02.06.20	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
32	masih adanya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang tidak Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan sesuai standar, adanya Pengadaan dan distribusi Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin,	ROO.25.02.06.07	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
33	Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Penyusunan rencana penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kabupaten/kota tidak sesuai dengan kebutuhan riil	RF.25.02.06.21	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
34	Terjadinya pemecahan kegiatan PBJ karena adanya benturan kepentingan sehingga rawan terjadi penyuaian atau justru berpotensi pada kerugian keuangan negara	RF.25.02.06.22	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
35	Calon Penyedia pada etalase katalog lokal kurang dari 3 (tiga) sehingga kurang mendukung pelaksanaan persaingan yang sehat dan berpotensi timbulnya fee proyek	RF.25.02.06.23	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
36	tidak optimalnya Proses Pemberian Layanan kepada Masyarakat	RF.25.02.06.24	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
37	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak valid	RF.25.02.06.25	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
38	tidak optimalnya pelayanan kesehatan sesuai siklus hidup (ibu hamil, ibu melahirkan, bayi, balita, usia pendidikan dasar, remaja, usia produktif dan lansia), tidak optimalnya tata kelola dan pelayanan penyakit menular dan tidak menular, tidak optimalnya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat dan tidak optimalnya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan kepada masyarakat	ROO.25.02.06.08	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

39	Penyusunan rencana Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota tidak sesuai dengan kebutuhan riil	RF.25.02.06.26	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
40	Terjadinya pemecahan kegiatan PBJ karena adanya benturan kepentingan sehingga rawan terjadi penyusutan atau justru berpotensi pada kerugian keuangan negara	RF.25.02.06.27	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
41	Calon Penyedia pada etalase katalog lokal kurang dari 3 (tiga) sehingga kurang mendukung pelaksanaan persaingan yang sehat dan berpotensi timbulnya fee proyek	RF.25.02.06.28	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
42	tidak optimalnya Proses Pemberian Layanan kepada Masyarakat	RF.25.02.06.29	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
43	Penyaluran bantuan hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku	RF.25.02.06.30	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
44	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak valid	RF.25.02.06.31	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
45	faskes tidak memenuhi standar mutu	ROO.25.02.06.10	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
46	Penyusunan rencana kegiatan Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan tidak sesuai kondisi riil	RF.25.02.06.32	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
47	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak valid	RF.25.02.06.33	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
48	Benturan kepentingan dalam proses Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan pada Fasilitas Kesehatan	RF.25.02.06.34	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
49	Penerbitan rekomendasi teknis dan perizinan tidak sesuai ketentuan	RF.25.02.06.35	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
50	adanya tenaga kesehatan yang praktek tidak memiliki ijin	ROO.25.02.06.11	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
51	Penyusunan rencana kegiatan Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota tidak sesuai kondisi riil	RF.25.02.06.36	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
52	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak valid	RF.25.02.06.37	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
53	Benturan kepentingan dalam proses Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	RF.25.02.06.38	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

54	Penerbitan rekomendasi teknis dan perizinan tidak sesuai ketentuan	RF.25.02.06.39	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
55	tidak terlaksananya perencanaan kebutuhan SDM	ROO.25.02.06.12	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
56	Penyusunan rencana kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah Kabupaten/Kota tidak sesuai kondisi riil	RF.25.02.06.40	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
57	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak valid	RF.25.02.06.41	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
58	rendahnya persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	ROO.25.02.06.13	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
59	Penyusunan rencana kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota tidak sesuai kondisi riil	RF.25.02.06.42	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
60	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak valid	RF.25.02.06.43	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
61	adanya Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan & Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) memiliki ijin	ROO.25.02.06.14	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
62	Penyusunan rencana kegiatan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) tidak sesuai kondisi riil	RF.25.02.06.44	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
63	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak valid	RF.25.02.06.45	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
64	Benturan kepentingan dalam proses Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	RF.25.02.06.46	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
65	Penerbitan rekomendasi teknis dan perizinan tidak sesuai ketentuan	RF.25.02.06.47	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
66	adanya Industri Pangan Rumah Tangga yang tidak bersertifikat Produksi	ROO.25.02.06.15	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
67	Penyusunan rencana kegiatan Penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan Nomor P-IRT sebagai izin produksi, makanan dan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri rumah tangga tidak sesuai kondisi riil	RF.25.02.06.48	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
68	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak valid	RF.25.02.06.49	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
69	Benturan kepentingan dalam proses Penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan Nomor P-IRT sebagai izin produksi, makanan dan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri rumah tangga	RF.25.02.06.50	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
70	Penerbitan rekomendasi teknis dan perizinan tidak sesuai ketentuan	RF.25.02.06.51	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

71	adanya Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) yang tidak diawasi dan tidak memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi	ROO.25.02.06.16	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
72	Penyusunan rencana kegiatan Penerbitan sertifikat laik sehat higiene sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan depot air minum (DAM) tidak sesuai kondisi riil	RF.25.02.06.52	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
73	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak valid	RF.25.02.06.53	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
74	Benturan kepentingan dalam proses Penerbitan sertifikat laik sehat higiene sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan depot air minum (DAM)	RF.25.02.06.54	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
75	Penerbitan rekomendasi teknis dan perizinan tidak sesuai ketentuan	RF.25.02.06.55	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
76	adanya Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan yang tidak dilakukan pengawasan serta tidak memiliki Stiker Pembinaan	ROO.25.02.06.17	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
77	Penyusunan rencana kegiatan Penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan tidak sesuai kondisi riil	RF.25.02.06.56	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
78	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak valid	RF.25.02.06.57	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
79	Benturan kepentingan dalam proses Penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan	RF.25.02.06.58	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
80	tidak Terlaksananya pemeriksaan laboratorium pewarna dan pengawet yang dilarang pada makanan/minuman	ROO.25.02.06.18	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
81	Penyusunan rencana kegiatan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga tidak sesuai kondisi riil	RF.25.02.06.59	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
82	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak valid	RF.25.02.06.60	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
83	Benturan kepentingan dalam proses Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	RF.25.02.06.61	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
84	tidak optimalnya kegiatan Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	ROO.25.02.06.19	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
85	Penyusunan rencana kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota tidak sesuai kondisi riil	RF.25.02.06.62	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
86	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak valid	RF.25.02.06.63	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
87	tidak optimalnya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	ROO.25.02.06.20	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
88	Penyusunan rencana kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat tidak sesuai kondisi riil	RF.25.02.06.64	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
89	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak valid	RF.25.02.06.65	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL